



**DINAS KESEHATAN
KAB. DELI SERDANG**

Laporan

**Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN**

**Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 Telp./fax: (061)7951849
E-Mail: dinkes@deliserdangkab.go.id Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan program/kegiatan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang mencakup 12 jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 kami susun sebagai wujud tanggung jawab kami dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud di Kabupaten Deli Serdang walaupun begitu banyak permasalahan dan kendala yang kami hadapi di tahun 2020 karena seluruh dunia sedang bersama-sama berjuang untuk melawan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bukan hanya memengaruhi kesehatan tapi juga seluruh aspek kehidupan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian kita terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Masukan dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan dalam rangka kesempurnaan penyajian laporan ini. Salam Deli Serdang SEHAT.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Lubuk Pakam, Februari 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang**



**dr. Ade Budi Krista
Pembina Tingkat I
NIP. 19710313 200701 1 026**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	3
1.3. KEBIJAKAN UMUM	4
1.4. ARAH KEBIJAKAN.....	5
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
A. JENIS PELAYANAN DASAR	7
B. TARGET PENCAPAIAN SPM.....	8
C. REALISASI.....	8
D. ALOKASI ANGGARAN.....	15
E. DUKUNGAN PERSONIL.....	16
F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	21
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	36
BAB IV PENUTUP	38



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.....	9
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Menurut Sumber Dana Tahun 2020	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.....	19
Tabel 2.4	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.....	22
Tabel 3	Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan. Setiap kebijakan publik harus selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan faktor eksternal maupun internal organisasi. Faktor eksternal seperti perubahan epidemiologi penyakit, pertumbuhan dan perkembangan penduduk, perubahan iklim dan ekologi termasuk memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor internal organisasi seperti sumber daya manusia, dukungan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan demokrasi, *good governance* termasuk perkembangan teknologi informasi. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan



Pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke-enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pencapaian target SPM juga diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara.

Sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan format laporan penerapan SPM daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaporkan Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli



Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 03); dan

6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 26).

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya target SPM yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencapai sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan strategi Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Berkelanjutan dengan arah kebijakannya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memenuhi mutu dan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan.



D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang difokuskan guna:

1. Memajukan dan memantapkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perdagangan dan jasa, pertanian, industri, serta menciptakan peluang berusaha dan kesempatan untuk bekerja; dan
3. Mewujudkan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah destinasi yang aman dan nyaman, kota yang cerdas, religius dan berdaya saing,



memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat dengan COVID-19. Situasi masyarakat dan anggaran daerah juga ikut berubah akibat yang ditimbulkan oleh bencana nonalam COVID-19 seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dampak dari pandemi tersebut tentunya memengaruhi target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan penambahan dan/atau pengurangan program/kegiatan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam menyikapi situasi pandemi nasional COVID-19. Belanja daerah Kabupaten Deli Serdang diarahkan pada percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Secara garis besar belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ);
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

C. REALISASI

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.1
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	44.304	90,92
				Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	48.727	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	43.445	93,41
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	46.512	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	42.083	95
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	44.298	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	152.358	86,38
				Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	176.385	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	271.803	84,43
				Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	321.921	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang berusia 15 - 59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.183.589	83,36
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.419.827	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	150.713	95,86
				Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	157.214	
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	429.257	86,69
				Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	495.191	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	36.443	92,43
				Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	39.426	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.428	77,62
				Jumlah ODGJ Berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerjakab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.128	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase jumlah orang teerduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di	100	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	15.838	57,56



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2020	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2020	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
		wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	27.518	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	23.796	38,81
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	61.313	



D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan berjumlah Rp. 62.790.623.427,00 dengan realisasi program sebagai berikut.

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Menurut Sumber Dana
Tahun 2020

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sumber Dana
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.651.185.427,00	10.460.977.769,00	76,63	APBD, APBN
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.684.959.000,00	29.394.151.200,00	99,02	APBD, APBN
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	873.002.000,00	765.203.354,00	87,65	APBD, APBN
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.599.321.000,00	2.118.644.884,00	81,51	APBD, APBN
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.551.508.200,00	1.193.443.000,00	76,92	APBD
6. Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	27.518.000,00	0	0	APBD
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	35.144.000,00	0	0	APBD



Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sumber Dana
8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	14.335.401.800,00	4.050.234.553,00	28,25	APBD, APBN
9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	32.584.000,00	17.184.000,00	52,74	APBD
Jumlah	62.790.623.427,00	47.999.838.760,00	76,44	

Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2021

E. DUKUNGAN PERSONIL

Proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang tersebar di 22 Kecamatan dengan rincian 26 unit Puskesmas Rawat Inap dan 8 (delapan) unit Puskesmas Rawat Jalan pada tahun 2020. Selain itu di 22 kecamatan juga tersebar 109 Puskesmas Pembantu dan 159 Pos Kesehatan Desa. Pada tahun 2020, Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Pancur Batu ditingkatkan menjadi Rumah Sakit (RS) Kelas D dan peningkatan Puskesmas Pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu menjadi Puskesmas.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan, standar rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 34 unit dan jumlah penduduk Kabupaten Deli



Serdang tahun 2020 sebanyak 2.271.291 jiwa, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 adalah 0,45 yang berarti 1 (satu) Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk.

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh UPT Dinas tahun 2020 sebanyak 2.641 orang dengan rincian 2.279 berstatus PNS (86,29%) dan 362 orang merupakan Non PNS (13,71%). Jumlah SDM tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar yang terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, maka yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma tiga (D-3) yang terdiri dari tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, teknik biomedika, kesehatan lingkungan, gizi, dan keteknisian medis. Tenaga penunjang yang dimaksud dalam SDM ini terdiri dari tenaga struktural, dukungan manajemen serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan



pengelompokan SDMK tersebut, tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas sebanyak 2.068 orang (78,30%); asisten tenaga kesehatan sebanyak 337 orang (12,76%) serta tenaga penunjang sebanyak 236 orang (8,94%). Jumlah SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3

Rekapitulasi SDM Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO	FASILITAS KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN				ASISTEN TENAGA KESEHATAN				TENAGA PENUNJANG				JUMLAH PER FASILITAS KESEHATAN			
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	TUNTUNGAN	4	37	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	5	38	0	7
2	GUNUNG MERIAH	4	27	0	0	0	2	0	0	1	1	2	2	5	30	2	2
3	TIGA JUHAR	2	43	0	4	0	5	0	15	0	1	1	0	2	49	1	19
4	SIBOLANGIT	3	45	0	0	0	3	0	0	1	1	3	7	4	49	3	7
5	BANDAR BARU	2	36	0	0	0	3	0	0	0	1	3	3	2	40	3	3
6	KUTALIMBARU	7	61	0	7	0	0	0	0	1	0	0	2	8	61	0	9
7	PANCUR BATU	7	55	0	0	3	28	0	0	1	1	0	0	11	84	0	0
8	GUNUNG TINGGI	3	51	0	3	0	6	0	0	1	3	2	2	4	60	2	5
9	NAMORAMBE	3	95	0	1	0	8	0	0	1	1	0	5	4	104	0	6
10	BIRU-BIRU	2	71	0	3	0	2	0	0	1	2	2	7	3	75	2	10
11	TALUN KENAS	3	49	1	6	0	4	0	0	1	2	1	1	4	55	2	7
12	BANGUN PURBA	2	42	1	3	0	9	0	3	1	2	4	11	3	53	5	17
13	GALANG	1	59	1	14	0	0	0	0	0	0	2	2	1	59	3	16
14	PETUMBUKAN	2	38	1	2	0	2	0	0	1	1	0	0	3	41	1	2



NO	FASILITAS KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN				ASISTEN TENAGA KESEHATAN				TENAGA PENUNJANG				JUMLAH PER FASILITAS KESEHATAN			
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
15	TANJUNG MORAWA	1	64	0	5	0	21	0	0	2	0	4	3	3	85	4	8
16	DALU SEPULUH	3	64	4	10	1	16	0	0	0	1	0	0	4	81	4	10
17	PATUMBAK	5	64	0	8	0	3	0	0	1	2	1	2	6	69	1	10
18	DELITUA	6	61	0	5	0	2	0	0	0	1	2	2	6	64	2	7
19	MULYOOREJO	4	70	1	6	1	3	0	0	0	1	1	1	5	74	2	7
20	SEI MENCIRIM	2	36	1	5	1	42	0	0	1	3	2	2	4	81	3	7
21	SEI SEMAYANG	1	29	0	1	1	7	0	0	1	0	0	6	3	36	0	7
22	HAMPARAN PERAK	6	87	0	0	1	7	0	0	0	1	3	3	7	95	3	3
23	KOTA DATAR	5	38	2	4	0	0	0	1	0	1	2	2	5	39	4	7
24	LABUHAN DELI	6	49	3	8	0	3	0	0	0	1	0	0	6	53	3	8
25	PEMATANG JOHAR	6	19	0	1	2	26	0	0	1	1	5	4	9	46	5	5
26	BANDAR KHALIFAH	5	61	1	3	0	12	0	6	1	0	2	1	6	73	3	10
27	KENANGAN	2	41	0	6	1	31	0	0	0	2	2	2	3	74	2	8
28	TANJUNG REJO	4	70	0	12	2	4	0	0	2	4	1	3	8	78	1	15
29	BATANG KUIS	2	70	0	9	0	1	0	0	2	2	7	2	4	73	7	11
30	PANTAI LABU	2	46	0	3	3	5	0	0	1	1	0	7	6	52	0	10



NO	FASILITAS KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN				ASISTEN TENAGA KESEHATAN				TENAGA PENUNJANG				JUMLAH PER FASILITAS KESEHATAN			
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
31	ARASKABU	0	40	0	7	0	2	0	0	1	2	2	3	1	44	2	10
32	KARANG ANYER	4	34	0	1	0	1	0	0	1	0	2	6	5	35	2	7
33	PAGAR JATI	3	39	1	3	0	0	0	0	0	2	4	2	3	41	5	5
34	LUBUK PAKAM	1	38	0	0	0	30	0	0	0	4	4	3	1	72	4	3
35	PAGAR MERBAU	1	51	0	10	0	7	0	0	1	2	1	2	2	60	1	12
	TOTAL	114	1780	17	157	16	296	0	25	26	47	65	98	156	2123	82	280

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sasaran ibu hamil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dikarenakan tingkat mobilitas penduduk Deli Serdang yang sangat tinggi (sering berpindah-pindah) sehingga data tidak akurat	Data sasaran disesuaikan dengan jumlah ibu hamil di lapangan	Proaktif dalam melakukan pemutakhiran data dari seluruh jejaring Puskesmas	Kurangnya laporan dari jejaring Puskesmas	Koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan	Membuat pertemuan yang mengundang jejaring Puskesmas untuk membahas pelaporan ANC (<i>Antenatal Care</i>)	Keterbatasan anggaran karena Pandemi COVID-19	Refocussing anggaran sesuai dengan prioritas dimana SPM harus menjadi prioritas	Menguatkan pembiayaan bersumber BOK Puskesmas dan Dana Desa
		Kurangnya sarana pendukung pemeriksaan ANC	Melengkapi sarana pendukung pemeriksaan ANC	Membuat usulan pengadaan alat pemeriksaan ANC	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ANC	Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas	Melaksanakan kelas ibu hamil di Puskesmas	Penyediaan sarana pendukung bersumber APBD terbatas karena adanya refocussing anggaran akibat		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
								Pandemi COVID-19		
		Kompetensi bidan di desa tentang tata laksana ANC sesuai Standar 10 T yang masih belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penyegaran terhadap bidan di desa	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas bidan di desa	Pelatihan, uji kompetensi dan peningkatan kapasitas bidan di desa	Masih kurangnya koordinasi bidan swasta dengan Bidan Koordinator (Bikor) yang ada di setiap wilayah kerja Puskesmas	Bikor rutin melakukan pembinaan dengan bidan di wilayah kerja Puskesmas	Menjadwalkan pembinaan dan pelaporan rutin dari setiap bidan yang melakukan praktik di wilayah kerja Puskesmas			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Belum berjalannya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan baik, karena tidak semua sasaran ibu	Meningkatkan pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/penempatan Stiker P4K	Mengevaluasi pemanfaatan penempelan Stiker P4K	Masih adanya klinik bersalin swasta yang tidak melaporkan pencatatan dan pelaporan persalinan yang sudah ditolongnya	Permintaan laporan KIA ke klinik bersalin swasta	Bikor membuat jadwal rutin untuk pertemuan dengan klinik bersalin swasta di wilayah kerjanya.	Masih kurangnya dana untuk peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa mengenai Program KIA	Tambahan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa mengenai Program KIA.	Mengusulkan tambahan pengajuan dana dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM									
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan			
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	
		bersalin melahirkan di Kabupaten Deli Serdang mengingat Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan Kota Medan dan Kabupaten lainnya									mengenai Program KIA.
		Penggunaan Kantong Persalinan Belum Optimal Data sasaran ibu bersalin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Penekanan ke bidan penanggung jawab Penggunaan Kantong Persalinan	Mengevaluasi pemanfaatan Kantong Persalinan	Masih rendahnya dukungan keluarga terhadap ibu bersalin	Peningkatan pengetahuan kepada keluarga mengenai persalinan yang aman dan baik	Melakukan Kelas Ibu Hamil dengan intensitas lebih baik lagi	Masih kurangnya dana untuk melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil	Tambahan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Mengusulkan tambahan pengajuan dana dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	
					Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan masa nifas yang ketiga	Kunjungan petugas ke rumah ibu nifas	Meningkatkan kunjungan petugas ke rumah ibu nifas				



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					(29-42 hari setelah melahirkan)					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Ibu yang melahirkan tidak semua melahirkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan neonatus	Kunjungan ke rumah ibu BBL oleh petugas kesehatan	Melakukan kunjungan ke rumah ibu BBL oleh petugas kesehatan	Masih kurangnya dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus	Tambahan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus yang akan dilaksanakan di setiap desa	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus
		Sasaran tidak sesuai dengan yang ada di lapangan				Intensitas frekuensi Kelas Ibu Hamil	Meningkatkan frekuensi Kelas Ibu Hamil			
4	Pelayanan Kesehatan Balita				Kurangnya kepedulian masyarakat khususnya ibu yang memiliki Balita untuk datang ke Posyandu	Kegiatan inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu yang memiliki balita untuk membawa Balitanya ke Posyandu	Membuat inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu yang memiliki balita untuk membawa Balitanya ke Posyandu	Masih kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita.	Tambahan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					Pada umumnya masyarakat tidak datang lagi ke Posyandu jika Balita sudah selesai mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan keluarga dan lintas sektor mengenai peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan Balita	Melibatkan keluarga dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Balita.	Keterbatasan anggaran karena Pandemi COVID-19		
					Kurangnya kerjasama lintas sektor untuk mengaktifkan Posyandu terintegrasi dengan PAUD					
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Data sasaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena sasaran usia pendidikan dasar tidak seluruhnya	Membuat jadwal rutin ke sekolah oleh petugas.	Membuat rencana kegiatan (<i>Plans of Actions</i>) Program UKS.	Masih rendahnya kerja sama petugas dengan pihak sekolah dalam kegiatan anak usia pendidikan dasar	Penjadwalan kunjungan dengan pihak sekolah oleh petugas kesehatan	Membuat jadwal rutin pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah	Masih kurangnya dana pelaksanaan kunjungan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan	Tambahan dana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		bersekolah di Kabupaten Deli Serdang masih banyak yang bersekolah di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain						dasar ke sekolah		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas (Posbindu Kit)			Pemahaman petugas dalam melaksanakan pelayanan pada usia produktif belum sesuai dengan standar teknis dan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan usia produktif	Penyuluhan kepada masyarakat agar mau melakukan pemeriksaan	Melakukan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Keterbatasan anggaran karena Pandemi COVID-19		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		Data sasaran tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan								
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas (Posbindu Kit)	Sosialisasi dengan masyarakat dan lintas sektor untuk membentuk Posyandu Lansia.	Masih kurangnya dukungan lintas sektoral dalam kegiatan pelayanan program Lansia	Masih rendahnya minat Lansia berkunjung ke Posyandu Lansia	Kerja sama dengan badan desa dan lintas sektoral	Membuat jadwal pertemuan untuk pembahasan mengenai capaian kunjungan Lansia di Posyandu	Masih kurangnya dukungan dana dalam kegiatan kunjungan <i>Home Care</i> lansia yang beresiko tinggi (resti)	Pengajuan Program Lansia yaitu <i>Home Care</i> Lansia Resti	Mengajukan kegiatan Program Lansia yaitu <i>Home Care</i> Lansia Resti
		Masih kurangnya Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia dalam Kegiatan Posyandu Lansia	Pengajuan Kebutuhan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia	Mengajukan pengadaan barang untuk kebutuhan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia	Masih kurangnya kepedulian lintas sektor untuk capaian Program Lansia	Melibatkan lintas sektor dalam kegiatan Program Lansia	Membuat jadwal pertemuan untuk pembahasan mengenai capaian kunjungan Lansia dengan lintas sektor	Masih terbatasnya dana untuk mendukung Program Lansia	Pengajuan dana untuk kebutuhan Program Lansia	Mengajukan kebutuhan dana Program lansia



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam penambahan Posyandu Lansia baru	Kerjasama dengan pihak kecamatan/desa untuk membuka Posyandu Lansia yang baru.	Mengajukan ke pemangku jabatan di kecamatan/desa untuk membuka Posyandu Lansia yang baru.	Masih kurangnya dana untuk pengadaan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia	Pengajuan dana untuk pengadaan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia	Mengajukan kebutuhan dana untuk Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Data sasaran tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan	Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan mengenai definisi operasional	Melakukan technical update untuk petugas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat	Melakukan pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai dengan SOP	Melakukan koordinasi lintas sektor	Dana yang terbatas untuk pemeriksaan Hipertensi sesuai standar	Pengajuan dana untuk pemeriksaan hipertensi sesuai standar	Mengajukan kebutuhan dana untuk pemeriksaan hipertensi sesuai standar
		Kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas (Posbindu Kit)			Beredarnya informasi yang salah di masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi			Keterbatasan anggaran karena Pandemi COVID-19		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					Pemahaman petugas dalam melaksanakan pelayanan pada penderita hipertensi belum sesuai dengan standar teknis dan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi					
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (DM)	Data sasaran tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan			Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat	Melakukan pelayanan kesehatan DM sesuai dengan SOP	Melakukan koordinasi lintas sektor	Kurangnya bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan kadar gula darah	Menambah ketersediaan bahan medis habis pakai	Membuat usulan bahan medis habis pakai sehingga ditampung dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO)



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		Kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas (Posbindu Kit)			Beredarnya informasi yang salah di masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DM					
					Pemahaman petugas dalam melaksanakan pelayanan pada penderita DM belum sesuai dengan standar teknis dan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan pada penderita DM					



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dan keluarga penderita ODGJ	Koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan dari jejaring Puskesmas yang berdampak pada pencabutan izin operasional			
					Rasa malu yang dimiliki masyarakat untuk memeriksakan anggota keluarga yang ODGJ	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap ODGJ	Memberikan informasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					Informasi yang salah tentang ODGJ sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa					
					Pemahaman petugas dalam melaksanakan pelayanan pada penderita ODGJ belum sesuai dengan standar teknis dan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ					



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Banyaknya biaya untuk skrining kasus suspect TB			Masih kurangnya peran serta masyarakat	Penguatan komitmen untuk melaksanakan TB-DOTS	Melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta dimana pengisian aplikasi SITB sebagai salah satu syarat pengurusan izin			
					Investigasi kontak belum maksimal					
					Jejaring eksternal Puskesmas belum berjalan					
					Kader Peduli TB tidak aktif					
					Skrining komorbid					
					Penanganan faktor resiko					



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					Sigma masyarakat					
					Belum semua fasilitas kesehatan swasta melaporkan kasus Tuberkulosis					
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV				Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dan tinggi biaya untuk skrining kasus HIV	Meningkatkan koordinasi antar pengelola program dalam pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Membuat perencanaan terpadu untuk menyinergikan program kesehatan ibu dan program HIV	Kurangnya rapid test untuk melakukan pemeriksaan skrining HIV	Tambahan dana untuk pengadaan rapid test pemeriksaan skrining HIV	Mengusulkan tambahan dana untuk pengadaan rapid test pemeriksaan skrining HIV



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada akhir tahun anggaran 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sudah mencantumkan program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang pencapaian SPM, namun dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, maka pada tahun anggaran 2020 tidak seluruhnya program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocussing anggaran dan penerapan protokol kesehatan yang membatasi adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Program dan kegiatan yang langsung terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang terealisasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Program	Kegiatan
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Manajemen Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Gerakan Sadar Gizi untuk menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting



No	Program	Kegiatan
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
		Peningkatan Imunisasi
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB
		Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Operasional Kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
		Penatalaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular



BAB IV

PENUTUP

Dalam menerapkan dan mencapai SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep standar pemenuhan mutu dan jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan, juga diperlukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertugas untuk:

1. Merumuskan data sasaran dari setiap jenis pelayanan dasar di Kabupaten Deli Serdang agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Menyusun rencana aksi penerapan SPM Bidang Kesehatan yang mencakup 12 jenis pelayanan dasar, yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



3. Melakukan koordinasi lintas program/sector terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM Bidang Kesehatan secara periodik;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM Bidang Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan integrasi SPM Bidang Kesehatan ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Deli Serdang.
7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
8. Mengoordinasikan perumusan strategi pemenuhan penerapan SPM Bidang Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
9. Melakukan sosialisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi; dan
11. Mengoordinasikan dan menganalisis pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagai dasar untuk perencanaan (pemetaan target) tahun berikutnya.

*Laporan Penerapan SPM
Bidang Kesehatan
Tahun 2020*



Pembentukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat berfungsi dengan baik sehingga kebutuhan standar mutu dan jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 kami laporkan sebagai wujud tanggung jawab kami dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud di Kabupaten Deli Serdang.

Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam, Februari 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang**



**dr. Ade Budi Krista
Pembina Tingkat I
NIP. 19710313 200701 1 026**